ISSN: 1693-7368
ISSN elektronik: 1907-9281

JURNAL PENELITIAN BIDANG ILMU PERTANIAN

Volume 7 Nomor 1, April 2009

AGB
030407

BIDANG ILMU PERTANIAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH-I
(NAD-SUMATERA UTARA)

JURNAL PENELITIAN BIDANG ILMU PERTANIAN

Volume 7, Nomor 1, April 2009

ISSN: 1693-7368

ISSN elektronik: 1907-9281

<http://www.geocities.com/jurnalpend>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Evaluasi Kesesuaian Lahan Desa Harian dan Desa Sitingjak untuk Tanaman Palawija (Jagung, Kacang Tanah, dan Kacang Hijau) Pengganti Tanaman Padi Sawah <i>Posma Marbun</i>	1
Program Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan) di Sumatera Utara <i>Biliter Sirait dan Tumiar Sianturi</i>	32
Pengaruh Pupuk Cair Organik Super Biota Plus dan Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Sawi (<i>Brassica juncea</i> L.) <i>Noverita S.V. dan Frida</i>	39
Protein: Struktur, Fungsi, dan Biosintesis <i>Parsaoran Sihombing</i>	46
Peningkatan Kandungan Protein Cassapro sebagai Salah Satu Sumber Protein Pakan Ternak Secara Fermentasi dengan Bantuan <i>Aspergillus niger</i> <i>Indrawaty Sitepu</i>	49
Pengaruh Pupuk Organik dan Growtone terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit <i>Bahtiar Harun dan Mazlina</i>	57
Perspektif Pengelolaan Agroforestri di Sumatera Barat: Studi terhadap Hak-Hak Penguasaan Pohon pada Lahan Komunal <i>Tri Martial, Helmi, Nursyirwan Effendi, dan Endry Martius</i>	64
Pertumbuhan dan Produksi Beberapa Varietas Padi (<i>Oryza sativa</i> L.) pada Lahan Tadah Hujan <i>Nurhayati</i>	73
Petunjuk Penulisan Naskah untuk Jurnal Penelitian Pertanian.....	79

PERSPEKTIF PENGELOLAAN AGROFORESTRI DI SUMATERA BARAT: STUDI TERHADAP HAK-HAK PENGUASAAN POHON PADA LAHAN KOMUNAL*

Tri Martial¹, Helmi², Nursyirwan Effendi², dan Endry Martius²

*Bagian dari Disertasi Pembangunan Pertanian Unand Padang

¹ Staf Pengajar Fakultas Pertanian UISU Medan, email: trimartial@gmail.com

² Staf Pengajar Pascasarjana Unand, Padang

ABSTRAK

Agroforestri sebagai model manajemen hutan berbasis masyarakat umumnya tidak berkembang dan sebagian besar dalam bentuk manajemen tradisional. Keberlanjutannya perlu dikaji berdasarkan hak-hak penguasaan pohon yang jelas akan mendorong sistem ini ke pemanfaatan yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini untuk mengidentifikasi karakteristik penguasaan pohon dalam rejim hak-hak properti yang mendukung keberlanjutan pembangunan agroforestri

Temuan disini mengindikasikan pada lahan ulayat, hak-hak komunal menjadi pembatas terhadap pemanfaatan secara perorangan. Penanaman pohon bukan ditentukan oleh status lahan, tetapi lebih kepada keamanan penguasaan pohon itu sendiri.

Kata kunci: Agroforestri, Lahan ulayat, Penguasaan pohon, Keberlanjutan, Hak-hak properti

I. PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk yang semakin tinggi memunculkan kepentingan beragam terhadap hutan, diantaranya konversi menjadi lahan pertanian, pemanfaatan kayu, serta produk-produk hutan lainnya. Tingginya kepentingan terhadap hutan ini menimbulkan konflik dalam pengelolaan hutan lestari. Konflik kepentingan ini berdampak pada masyarakat lokal yang merasa tidak aman terhadap status hak kepemilikan pada lahan-lahan komunal mereka. Ketidajelasan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan menjadi problem dalam mengelola hutan di lahan-lahan masyarakat. Hal ini terkait dengan sistem penguasaan lahan dan vegetasi di atasnya, khususnya penguasaan pohon. Menurut FAO (2002) hak-hak penguasaan ini menyangkut siapa yang dapat memanfaatkan sumber daya apa, berapa lama dan dalam kondisi apa, dalam hal ini pemanfaatan pohon. Tanpa kejelasan hak-hak penguasaan pada pohon akan memicu pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan.

Agroforestri yang sering diintroduksi sebagai bentuk pengelolaan hutan masyarakat potensial untuk dikembangkan sebab dinilai sebagai sistem *land use* yang tepat untuk

mengatasi masalah kerusakan hutan dengan melakukan penanaman pohon pada lahan pertanian, serta mampu meningkatkan pendapatan petani dan akhirnya mengurangi intensitas tekanan pada hutan (Segura-Bonilla, 1997; Unruh, 2001; Place dan Otsuka, 1997; Dias, 2003). Namun program-program ini seperti UPSA (usaha pelestarian sumberdaya alam), hutan kemasyarakatan (HKM), agrokompleks, budidaya lorong, pengembangan MPTS (*multipurpose Trees and Shrubs Species*) atau tanaman serba guna dan sebagainya lebih sering menunjukkan hasil yang kurang memadai (Djogo et al, 2003).

Menurut Dias (2003) yang menjadi penghambat utama kegagalan penanaman pohon adalah ketidakpuasan terhadap penguasaan lahan dan pohon (*land and tree tenure security*). Menurutnya hambatan akibat ketidak-amanan sistem tenurial ini mencapai 68 persen dibandingkan hambatan dalam bentuk lain. Ketika keberadaan kayu dilahan petani tidak memberikan kompensasi kepada mereka, maka petani akan menebangi seluruh pohon yang tumbuh di lahan mereka. Sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif pada institusi *land* dan *tree tenure* ini untuk mendapatkan pendekatan yang terbaik.

Di Sumatera Barat agroforestri telah dikenal secara luas sejak lampau dalam bentuk 'parak' (lahan berhutan). Agroforestri umumnya ditemui pada lahan-lahan masyarakat khususnya pada lahan kering dalam bentuk ladang atau kebun pada lahan *ulayat* dan tidak bersertifikat. Lahan *ulayat* menurut Van Dijk (dalam Syahyuti, 2006) adalah hak atas tanah adat berupa hak persekutuan atau pertuanan. Lahan umumnya merupakan kepemilikan komunal kaum/suku, dimana pemegang lahan mendapatkan hak untuk mengelola lahan (*ganggam bauntuak*) sebagai warisan yang berasal dari garis ibu (*matrilineal*). Sebagai kepemilikan komunal lahan tidak dapat dijual tetapi dapat dipergunakan/diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari oleh pemegang lahan.

Kajian hak-hak masyarakat lokal pada lahan dan pohon dapat dilihat sebagai bentuk hak kepemilikan (*property right*) dalam sistem aturan kelembagaan (*role in use*). Di Indonesia *property right* berada dalam pengaturan yang sering tumpang tindih dalam aturan formal dan informal. Kepemilikan lahan sebagai bentuk *property right* merupakan permasalahan yang kompleks. Umumnya tanah-tanah tidak memiliki kejelasan status, sebab negara selain mengakui hak-hak kepemilikan sesuai dengan UUPA 1960 juga mengakui keberadaan hak *ulayat* (kepemilikan melalui lembaga adat). Akibatnya status penguasaan lahan juga beragam yang cenderung berubah. Penguasaan lahan dan pohon (*land and tree tenure*) merupakan merupakan bagian hak-hak properti yang terdiri dari sebundel hak-hak yang ditunjukkan dalam aturan yang menentukan relasi antar individual menyangkut pohon. (Feder dan Feeny, 1991; FAO, 2002).

Dari sisi pemanfaatan, pemegang lahan pada dasarnya dapat secara bebas mengelola agroforestri walaupun kepemilikan berada di tingkat komunal. Dalam hal ini terdapat dikotomi antara kepentingan individual dan komunal pada pemanfaatan pohon. Sehingga penting mengkaji peranan penguasaan pohon terhadap keberlanjutan agroforestri, yang di pandang dari rejim hak-hak properti (*property right regime*). Berdasarkan hal di atas proposisi yang dikemukakan adalah bahwa dalam pengelolaan agroforestri, hak-hak pada pohon tidak selalu ditentukan oleh status hak-hak pada lahan. Keberlanjutan agroforestri pada lahan komunal lebih ditentukan oleh keamanan penguasaan pohon dibanding dengan penguasaan pada lahan.

II. AREAL STUDI DAN METODOLOGI

Penelitian dilakukan di Sumatera Barat pada periode Januari sampai Juni 2008. Lokasi penelitian adalah areal *parak* yang merupakan integrasi pohon dan tanaman pertanian. Areal dipilih secara *purposive*, dengan kategori terdapat pola pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri atau dalam pengertian di Sumatera Barat sebagai '*parak*' yang didominasi oleh tanaman tahunan atau pohon dalam suatu bentang lahan.

Berdasar kategori di atas ditentukan tiga lokasi desa (*nagari*), yaitu: 1. Nagari Paninggahan, terletak di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. 2. Nagari Koto Malintang, terletak di kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. 3. Nagari Paru, terletak di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.

Observasi dilakukan dengan menilai dan menggambarkan pola-pola kelembagaan penguasaan pohon (*tree tenure*) pada lahan komunal dan dinamika yang terjadi pada variabel kelembagaan pohon yaitu kepemilikan, akses atau pemanfaatan, dan manajemen atau kontrol pada pohon. Pendekatan ini mengacu kepada '*Rapid appraisal social forestry for land and tree tenure*' dalam menentukan *land and tree tenure* (FAO, 2000). Lahan komunal dengan sistem agroforestri ini diklasifikasikan kedalam dua tipe yaitu lahan *ulayat kaum/suku* yang dimiliki oleh kelompok *kaum* atau *suku*, dan lahan *ulayat nagari* berupa lahan yang dimiliki oleh nagari.

Data primer didapat dari wawancara dan kuesioner dengan petani responden, serta wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu kepala desa (*walinagari*), ketua-ketua adat, dan ketua organisasi, sedang data sekunder berupa gambaran fisik wilayah setempat dari instansi terkait. Data meliputi keragaan penguasaan pohon, karakteristik agroforestri, karakteristik sosial ekonomi dan demografi rumah tangga petani, struktur dan peranan organisasi lokal.

Analisis Deskriptif untuk membangun eksplanasi terhadap keragaan dan dinamika penguasaan pohon yang meliputi kepemilikan (*ownerships*), pemanfaatan/akses (*use/access*) dan manajemen/kontrol (*management/control*), serta keamanan penguasaan pohon (*tree tenure security*)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguasaan pohon meliputi kepemilikan, pemanfaatan dan kontrol atau manajemen pohon. Pohon disini dimaksudkan adalah sebagai tanaman tahunan dengan berbagai manfaat seperti kayu maupun buah (*multipurpose*). Pola penguasaan pohon di tiga nagari penelitian pada tanah *ulayat kaum/suku* dan *nagari* ditunjukkan pada Tabel 1, 2, 3 dan 4.

3.1. Kepemilikan (*Ownership*)

Berdasarkan data di atas menunjukkan pola kepemilikan (*ownership*) pohon pada lahan *ulayat kaum/suku* menunjukkan pola yang tidak

banyak berbeda. Pada *ulayat kaum/suku* pohon dimiliki oleh penanam yang merupakan pemegang lahan (*ganggam bauntuak*) atau yang telah mendapat hak penguasaan lahan. Sedangkan pada lahan *ulayat nagari*, kepemilikan pohon pada dasarnya oleh *nagari*. Di lahan *ulayat kaum/suku*, tanaman pertanian merupakan kepemilikan penanam, tetapi pada jenis-jenis pohon yang bukan tanamannya sendiri terdapat hak komunalnya di situ. Hal ini dibuktikan dengan anggota komunal masih dapat meminta kayu di lahan untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, namun untuk tujuan komersial hal ini dilarang.

Tabel 1. Pola Kepemilikan, Pemanfaatan dan Kontrol pada Pohon di Tiga Nagari Penelitian

Jenis Lahan	Nagari		
	Paru	Koto Malintang	Paninggahan
<i>Ulayat Kaum/Suku</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilikan oleh pena-nam dan anggota <i>suku/kaum</i> • Pemanfaatan oleh pengelola/penanam/anggota <i>kaum</i> • Kontrol dilakukan oleh pemilik/pena-nam 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilikan oleh pena-nam dan anggota <i>suku/kaum</i> • Pemanfaatan oleh pengelola/penanam/anggota <i>kaum/nagari</i> • Kontrol dilakukan oleh pemilik/pe-nanam 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilikan oleh pena-nam, pengelola dan anggota <i>suku/kaum</i> • Pemanfaatan oleh pengelola/penanam, anggota <i>kaum</i> • Kontrol dilakukan oleh pemilik/penanam
<i>Ulayat Nagari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nagari</i> • Pemanfaatan oleh penduduk <i>nagari</i> untuk non-kayu • Kontrol oleh penduduk <i>nagari</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nagari</i> • <i>Nagari</i> dan penduduk <i>Nagari</i> dengan bagi hasil • <i>Nagari/KAN</i> dan Pemegang lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nagari</i> • <i>Nagari</i> dengan memberikan konsesi kepada penduduk <i>Nagari</i> • <i>Nagari/KAN</i> dan Pemegang lahan

Sumber: Observasi lapangan

Tabel 2. Jenis Hak-Hak Pohon yang Eksis di Tiga Nagari

No.	Jenis Hak	Nagari		
		Paru	Koto Malintang	Paninggahan
1.	Tanam dan tanam lagi	√	√	√
2.	Pemeliharaan	√	√	√
3.	Mewariskan	√	√	√
4.	Menebang	√	Γ	√
5.	Menggunakan pohon	√	Γ	Γ
6.	Menjual	Γ	Γ	Γ
	Rata-rata hak pada pohon yang eksis	5,8	3,45	4,7

Keterangan: √ = dapat dilakukan dengan pemberitahuan

Γ = dapat dilakukan dengan musyawarah/izin

Tabel 3. Kepemilikan Hak-Hak pada Pohon di Lahan Ulayat Kaum/Suku

No.	Jenis Hak	Nagari		
		Paru	Koto Malintang	Paninggahan
1.	Tanam dan tanam lagi	Perorangan	Perorangan	Perorangan
2.	Pemeliharaan	Perorangan	Perorangan	Perorangan
3.	Mewariskan	Perorangan/ komunal	Perorangan/ komunal	Perorangan/ komunal
4.	Menebang	Perorangan	Perorangan	Perorangan
5.	Menggunakan pohon	Perorangan/ komunal	Perorangan/ komunal	Perorangan/ komunal
6.	Menjual	Perorangan	Perorangan	Perorangan

Sumber: Observasi lapangan

Tabel 4. Kepemilikan Hak-Hak pada Pohon yang Eksis di Lahan Ulayat Nagari

No.	Jenis Hak	Nagari		
		Paru	Koto Malintang	Paninggahan
1.	Tanam dan tanam lagi	Nagari	Perorangan	Perorangan
2.	Pemeliharaan	Nagari	Perorangan	Perorangan
3.	Mewariskan	X	Nagari	Perorangan/nagari
4.	Menebang	X	X	X
5.	Menggunakan pohon	komunal	X	X
6.	Menjual	X	X	X

Sumber: Observasi lapangan

Keterangan: X= tidak dapat dilakukan/dilarang

Dalam persepsi kepemilikan lahan ulayat adalah abadi, dimana jika pengelolaan pada lahan dilakukan dengan baik ditandai dengan tanaman dan pengelolaan lahan maka hak pemilikan pada lahan juga tinggi. Jika lahan ditelantarkan atau tidak dikelola maka lahan akan kembali menjadi milik suku atau kaum yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan kepemilikan ini ditandai oleh pengelolaan lahan tersebut. Penanaman pohon bukan menjadi hambatan pada lahan komunal, justru kepemilikan lahan komunal akan memicu penanaman pohon. Hal ini sesuai dengan penelitian Otsuka *et al*, (2001) bahwa kepemilikan lahan-lahan komunal akan memicu penanaman pohon pada tingkat awal.

3.2. Pemanfaatan (Use)/Akses (access)

Pemanfaatan dan akses pada pohon ditentukan oleh hak-hak apa yang dapat dilakukan pada pohon (Tabel 2). Hak-hak ini dapat dilihat dari hak menebang dan memanfaatkan pohon. Aturan menebang pohon di Paru yang ditanam sendiri dan untuk dipakai sendiri boleh ditebang tanpa ijin tetua (*mamak*) suku, tetapi jika tujuan untuk menjual maka harus ada ijin. Sedangkan pohon yang tumbuh bukan tanaman sendiri (tanaman orang tua) boleh diminta oleh orang lain untuk ditebang jika diizinkan oleh yang punya lahan. Jika jenis yang

ditebang memiliki fungsi sosial bagi seluruh warga nagari, maka aturan berlaku dari seluruh tetua adat (*ninik-mamak*) di Paru, sedang pada jenis-jenis dengan fungsi sosial terbatas maka aturan hanyalah secara internal saja pada suku masing-masing. Di Koto Malintang, pohon Jika ditebang harus ada ijin *ninik mamak* ditambah wali nagari. Di Paninggahan aturan menebang pohon memerlukan ijin *mamak* dan kemudian ijin nagari.

Hak pemanfaatan di Paru ini juga menunjukkan status penguasaan pohon tergantung dengan jenisnya. Tanaman karet ataupun tanaman lainnya dapat dijual. Ukuran dapat dijual merupakan standar hak penguasaan tertinggi (Bruce, 1998; Otsuka *et al*, 1997), tetapi status hak dapat menjual ini juga berbeda antar jenis pohon. Jika kulit manis dijual maka hanya pohonnya saja yang dijual, tanah tetap milik penanam. Sedangkan jika karet dijual termasuk juga lahan yang bersangkutan. Penguasaan pohon dapat beragam tergantung kepada jenis pohon, penanam, dan tujuan pemanfaatan. Menjual karet sekaligus termasuk lahannya tetap menunjukkan sifat yang eksklusif sebab hanya dapat dijual kepada masyarakat nagari Paru, sedang jika dijual kepada orang non-Paru membutuhkan syarat-syarat khusus sehubungan dengan keanggotaan sebagai masyarakat hukum adat nagari Paru.

Di Koto Malintang pemanfaatan pohon dalam *ulayat* kaum/suku ini bervariasi tergantung kepada penanam, jenis yang ditanam, fungsi tanaman untuk kepentingan pribadi atau komunal. Pemanfaatan pohon di lahan *ulayat* umumnya berbentuk *parak* (kebun) yang terdiri dari jenis-jenis tanaman pohon. Pemanfaatan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pohon-pohon produktif dengan tujuan mendapatkan buahnya, serta pohon-pohon untuk tujuan mendapatkan manfaat kayunya, seperti surian, meranti, bayur, dan lainnya. Perbedaan dalam tujuan pemanfaatan ini menunjukkan pengelolaan kebun yang juga sangat berbeda. *Parak* umumnya didominasi pohon durian. Bentuk *agroforestri* di ketiga *nagari* tersebut tampak pada Tabel 5. Penguasaan hasil diatur berdasarkan penanam, pemelihara, dan jenis tanaman, sehingga pohon tidak dapat ditebang atas dasar keputusan perorangan.

Sedang di Paninggahan akses/pemanfaatan pohon dan produk pohon dilakukan oleh anggota kaum. Pemanfaatan umumnya untuk membangun rumah, tetapi tidak mutlak sebab dapat juga dijual. Pengelola dapat

menanam sesuai dengan kepentingannya, umumnya ditanam dengan jenis-jenis cengkeh, alpokat, coklat, mahoni, surian, jati, pinus, dan lain-lain. Di ladang ada yang ditebang, aturannya minta ijin/Peraturan *nagari* (PERNA). Penguasaan pohon dapat bersifat perorangan pada lahan-lahan komunal.

Dari sini dapat dijelaskan bahwa petani mempunyai kecenderungan menanam tanaman yang terjamin keamanannya jika tujuannya adalah untuk dijual atau mendapatkan *cash income*. Petani akan menghindari pemilihan tanaman jangka panjang penghasil kayu, dan memilih tanaman dengan jaminan untuk mendapatkan *cash income* dari tanaman tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 6. Dari sini nampak bahwa untuk tujuan *income*, maka petani lebih memilih *agroforestri* berbasis tanaman karet (*nagari* Paru) yang mencapai 89 persen dari total pendapatannya. Dengan basis karet yang merupakan tanaman berkayu, pola *agroforestri* di Paru menunjukkan variabel keberlanjutan yang juga tinggi jika dilihat dari dominasi karet dibandingkan tanaman lainnya (Tabel 7).

Tabel 5. Karakteristik Utama *Agroforestri* di Tiga *Nagari*

Agroforestri	Nagari		
	Paru	Koto Malintang	Paninggahan
Jenis tanaman bawah	Beberapa tanaman pangan dan semak	Semak belukar	Semak belukar dan alang-alang
Tanaman (<i>strata</i>) menengah	Buah-buahan	Kopi, Coklat, Kulit manis	Cengkeh, buah-buahan
Jenis tanaman (<i>strata</i>) atas	Karet, Durian, MPTS (<i>multipurpose tree species</i>) dengan penutupan tajuk sedang sampai tinggi	Durian, MPTS, dengan penutupan tajuk tinggi	MPTS dengan penutupan tajuk rendah

Sumber: Observasi lapangan

Tabel 6. Luas Lahan dan Pendapatan Petani di Tiga *Nagari*

No.	Keterangan	Paru	Koto Malintang	Paninggahan
1.	Luas lahan rata-rata	1,3 Ha	1.425 Ha	0.8125 Ha
2.	Pendapatan rata-rata	Rp.1.328.605	Rp.1.588.300	Rp.1.411.500
3.	Pendapatan per Hektar	Rp.1.022.000	Rp.833.200	Rp.587.840
4.	Persen pendapatan kebun	89,07%	74,12%	43,69%

Sumber: Observasi lapangan

Tabel 7. Jenis Tanaman Dominan pada Agroforestri di Lahan Ulayat Kaum/Suku

Paru			Koto Malintang		Panninggahan	
No.	Nama Jenis	Frek. Relatif	Nama Jenis	Frek. Relatif	Nama Jenis	Frek. Relatif
1.	Karet	95	Durian	95	Cengkeh	100
2.	Kulitmanis	65	Kulitmanis	80	Coklat	65
3.	Pinang	65	Bayur	65	Pokat	65
4.	Durian	40	Coklat	55	Pinang	45
5.	Sawit	30	Surian	55	Surian	45
6.	Gardamungu	25	Kopi	25	Mahoni	35
7.	Mangga	20	Pinang	25	Kemiri	30
8.	Meranti	20	Pala	15	Pisang	30
9.	Coklat	15	Cengkeh	5	Petai	25
10.	Ambacang	10	Gardamungu	5	Sawa	20

Sumber: Observasi lapangan

Pada tanaman (pohon) yang terdapat hak komunal padanya, maka pemegang lahan tidak dapat menggantikannya dengan jenis tanaman baru. Jadi disini hak individual pemegang lahan dan hak komunal tidak dapat dipisahkan. Keberadaan hak komunal pada dasarnya dilandasi status lahan yang merupakan kepemilikan komunal, sehingga pemegang lahan tidak dapat secara bebas mengubah pola tanam yang ada. Dampak dari kondisi ini dapat ditunjukkan di nagari Koto Malintang yang tetap mempertahankan pola agroforestri dengan berbasis pohon multiguna dengan dominasi durian pada lapisan tajuk teratas. Sementara di dua nagari lainnya pola agroforestri berbasis karet di Paru dan aroforestri dengan dominasi tanaman keras di Panninggahan.

Dominasi pohon sebagai unsur dominan pada agroforestri menjadi penentu bagi keberlanjutan sistem ini (MacDicken dan Vergera, 1990), unsur pohon ini menurut Raintree (1990) merupakan unsur utama keberlanjutan produksi dalam jangka panjang. Pada agroforestri dengan dominan tanaman non-kayu atau jenis tanaman pertanian lainnya akan mengakibatkan keberlanjutan sistem dalam jangka panjang dipertanyakan. Hak-hak komunal pada pohon justru akan memperkuat keberlanjutan sistem dengan mempertahankan pola tanam yang dilaksanakan dalam aturan kelembagaan lokal. Di Koto Malintang, dimana kepemilikan lahan komunal telah memapankan pertumbuhan pohon selama puluhan tahun. Pola agroforestri yang menyerupai hutan alam dengan dominasi Durian sebagai pohon utama serta jenis-jenis pohon multiguna merupakan pendekatan terhadap kearifan lokal dimana

pohon berfungsi menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai pendekatan terhadap pola manajemen lahan dan tanaman sesuai dengan pembatas lokal.

Fakta ini membuktikan bahwa privatisasi hak-hak penguasaan pada lahan komunal bukan penentu bagi keberlanjutan sistem manajemen sumber daya lahan. Hal ini merujuk kepada hak-hak properti ala Barat yang bertitik tolak dari totalitas hak-hak pada lahan akan mendukung investasi ke lahan dalam bentuk pohon (Bruce, 1988) atau penanaman pohon dan faktor keberlanjutannya akan dapat dilakukan pada hak-hak properti perorangan (*private property ownership*). Dengan sendirinya hak-hak properti komunal (*communal property ownership*) bukan pilihan dalam keberlanjutan manajemen sumber daya alam.

Pada lahan ulayat nagari akses/pemanfaatan lahan sangat tergantung kepada fungsi ulayat nagari tersebut. Di Paru ulayat nagari dimanfaatkan sebagai hutan lindung dengan tujuan manfaat lahan secara tidak langsung, yaitu untuk menjaga kelestarian sumber air pertanian. Sehingga penguasaan tersebut melibatkan peran serta seluruh warga dalam berbagai bentuk lembaga lokal, seperti KAN, *bundokanduang*, pemuda, kelompok tani, dan lain-lain.

Di Koto Malintang dan Panninggahan ulayat nagari difungsikan sebagai areal lahan yang diberikan hak pemanfaatan kepada warga nagari untuk tujuan sebagai sumber pendapatan, sehingga akses dan pemanfaatannya melibatkan pemegang lahan dan nagari sebagai pemilik lahan.

3.3. Kontrol

Mekanisme kontrol terhadap penguasaan kayu dilakukan oleh pemilik pengelola. Mekanisme kontrol pada pohon menyangkut hak-hak membuat keputusan terhadap pilihan tanaman dan manajemennya serta kemampuan mengeluarkan pengguna lain dari propertinya. Permasalahan umum dari kontrol pada pohon menyangkut konflik dengan pengguna lainnya. Hal ini menjadi wewenang pemilik pohon, tetapi permasalahan terhadap hak-hak atas pohon ini jika tidak dapat diselesaikan menyangkut konflik dengan pihak lain maka diselesaikan di tingkat *mamak* rumah, selanjutnya ke tingkat suku dan jika tidak dapat diselesaikan juga dibawa ke KAN. Musyawarah KAN dalam menuntaskan suatu konflik juga disertai seluruh unsur-unsur nagari seperti *walinagari*, pemuda dan *bundo kandung*. Pada tingkatan yang lebih tinggi akan melibatkan aparat pemerintah yang berwenang, misalnya kepolisian.

Pada *ulayat nagari* kontrol pohon tergantung kepada fungsi lahan *ulayat* tersebut. Di Paru dengan fungsi hutan lindung, maka kontrol melibatkan seluruh warga nagari yang direpresentasikan dengan lembaga khusus mempunyai hak kontrol terhadap hutan *ulayat nagari* tersebut. Sedangkan di Koto Malintang dan Paninggahan dengan memberikan lahan untuk dikelola oleh warga nagari, maka hak-hak kontrolnya sama dengan *ulayat kaum/suku* tersebut di atas.

3.4. Dinamika Hak-hak Perorangan dan Komunal

Keberadaan hak-hak lahan perorangan lemah sebab lahan tidak dapat dipindahtangankan, tetapi hak pengelolaan pada pohon tidak dibatasi. Hanya saja dalam pemanfaatan pohon diatur yang sesuai dengan kepentingan komunal. Hal ini menghasilkan kontinum seperti pada Gambar 1. Akibatnya terdapat pembatasan status keamanan penguasaan pohon perorangan yang ditentukan oleh status penguasaan secara komunal. Gambaran hal ini dapat diilustrasikan bahwa keamanan penguasaan tidak konstan berada pada suatu ekstrim sudut (dikotomi), tapi berubah (kontinum) sesuai dengan dinamika kepentingan komunal pada pohon (Gambar 1).

Dampak dari dibatasinya hak-hak individual oleh hak-hak komunal pada pohon adalah petani pemegang lahan sulit mengubah pola tanam pada lahan *ulayat*. Sedangkan pada

kasus ketika pembatasan oleh hak-hak komunal pada pohon berkurang, maka terdapat kecenderungan pemegang lahan mengubah pola tanaman ke arah jenis yang lebih komersial. Hal ini tampak pada karakteristik agroforestri yang berbeda di ketiga nagari tersebut (Tabel 5, 6, dan 7).

Gambar 1. Hubungan Keamanan Penguasaan Lahan dengan Status Pengelolaan pada Lahan Komunal

Menurut pendapat Place dan Otsuka (1997) dimana jika kepemilikan pribadi tidak pasti dan tidak jelas maka insentif pada lahan dan pohon akan terhambat. Selain itu juga keamanan penguasaan berefek positif pada investasi memacu lebih produktif dan pemanfaatan lahan lebih berkelanjutan. Di Sumatera Barat walaupun lahan berstatus kepemilikan komunal akses pada pohon diberikan kepada anggota komunal yang telah ditunjuk untuk mengusahakan lahan tersebut, sedang hak-hak pada anggota yang lain terbatas. Jadi kondisi ini berimplikasi terhadap pengelolaan (*management*) usaha tani dan bukan pada pemilikan (*ownership*) lahan, akibatnya hak-hak individual pada lahan bukan prasyarat untuk investasi ke lahan.

Hak-hak individual tidak berdiri sendiri pada pemilikan komunal. Tetapi terkait dengan hak-hak komunal yang tercermin dalam aturan-aturan adat (*customary*). Akibat aturan-aturan adat dalam suatu nagari dapat berbeda dengan nagari yang lain akan menghasilkan status keamanan penguasaan pohon yang dapat berbeda satu sama lain seperti di atas. Tingkat keamanan penguasaan yang lebih tinggi di paru > koto malintang > paninggahan menggambarkan lebih banyaknya hak-hak yang eksis yang dapat dilakukan oleh pemegang lahan walaupun dengan ijin tetua adat (*mamak*).

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan secara individual lebih mudah dilakukan, sehingga pada level tertinggi pohon dapat dipindahtangankan ke pihak lain. Jadi pembatasan hak bukan disebabkan pada lahan, tetapi pada penguasaan pohon itu sendiri. Hal ini berbeda dengan pendapat Otsuka et al (2001) yang menyebutkan petani cenderung tidak menanam pohon di lahan komunal karena memiliki keamanan penguasaan lahan yang rendah.

Hal ini menggambarkan bahwa hak-hak *private* dan komunal ini kedua-duanya eksis pada saat yang bersamaan, namun terdapat irisan hak-hak tersebut untuk kondisi seperti di atas. Irisan dalam hak-hak ini menggambarkan bahwa walaupun pada hak-hak komunal terdapat dalam vegetasi tanaman tertentu, tetapi juga hak-hak *private* pemegang lahan terdapat di situ. Sehingga irisan tersebut lebih menggambarkan hak-hak komunal berada dalam hak-hak pemegang lahan. Gambaran hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut

Gambar 2. Irisan Hak-Hak Komunal dan Hak Pemegang Lahan

Pada lahan komunal disini hak-hak pada lahan dan pohon tidak dapat dipisahkan dari hak-hak komunal. Hak-hak yang didapat secara individual justru didapatkan karena yang bersangkutan adalah anggota komunal (Syamsul Bahri, 1983). Oleh sebab itu status keamanan pada lahan dan pohon oleh pemegang lahan ditentukan oleh bagaimana hubungannya dengan hak-hak komunal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- Hak-hak perorangan dan komunal eksis pada penguasaan pohon (*tree tenure*) di lahan *ulayat* sebagai akibat kepemilikan lahan oleh komunal.

- Hak-hak komunal pada pohon membatasi kebebasan hak-hak individual, sehingga cenderung mempertahankan pola tanam yang ada (*agroforestri*), hal ini dilaksanakan dalam aturan kelembagaan lokal dan menjadi dasar keberlanjutan sistem *agroforestri*.
- Pilihan menanam atau tidak menanam pohon bukan ditentukan oleh status keamanan lahan komunal, tetapi lebih kepada aturan-aturan komunal terhadap penguasaan pohon (*tree tenure*) yang merupakan kepentingan secara komunal.
- Keterbatasan status keamanan penguasaan pohon di lahan komunal, mendorong petani lebih memilih tanaman untuk tujuan pendapatan langsung daripada pohon dengan hasil kayu.

4.2. Saran

Untuk mendorong penanaman pohon lebih dibutuhkan penguatan hak-hak penguasaan pohon (*tree tenure*) daripada status kepemilikan lahan seperti misalnya sertifikasi lahan yang mendorong privatisasi lahan. Untuk penelitian lebih lanjut penting melihat dari sisi peranan kelembagaan lokal dalam mendukung sistem penguasaan pohon di lahan komunal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruce, J.W. 1998. Review of Tenure Terminology. Tenure Brief-Land Tenure Center No.1 University of Wisconsin, Madison. www.wisc.edu
- Dias, H.U. 2003. Analysis of spatial distribution of tree Resources Outside the Forest in Ashanti Region, Ghana. Thesis in Int. Ins. For Geo-information Science and Earth Observation Enschede, The Netherlands
- FAO, 2000. Community Forestry Rapid Appraisal of Tree and Land Tenure. FAO Corporate Document Repository. www.fao.org
- Hayami, Y dan V.W. Ruttan. 1985. *Agriculture Development: An International Perspective*. The John Hopkins Press, Baltimore and London
- MacDicken dan Vergera. 1990. *The Clasification of Agroforestri*. In MacDicken dan N.T. Vergera (eds). 1990. *Agroforestry: Classification and Management*. Jhon Wiley and Sons, N.Y.

Michon, G., F. Mary dan J.M. Bompard. 1986. Multistoried agroforestry garden system in West Sumatera, Indonesia. *Agroforestry Systems* Vol 4: 315-338

Otsuka, K, S. Suyanto, dan T.P. Tomich. 1997. Does land Tenure Insecurity Discourage Tree Planting? Evolution of Customary Land Tenure and Agroforestry Management in Sumatera. *EPTD Discussion Paper* No. 31. IFPRI, U.S.A. www.ifpri.org

Place, F., K.Otsuka dan S. Scherr. 2004. Collective action and Property right for sustainable development. Property right, Collective action and Agroforestry. Focus 11 Brief 5 of 16 Pebruari 2004. Int.Food Policy Research Institute. www.ifpri.org

_____, K. Otsuka. 1997. Population Pressure, Land Tenure and Tree Resource Management in Uganda. *EPTD Discussion Paper* No. 24. Int. Food Police Reserch Int. www.ifpri.org

Segura-Bonilla, O. 1997. Institutional Change and Forestry in Central America. Paper presented at the DRUID Workshop, Copenhagen, Denmark 8-10 Januari 1997.

Syahyuti. 2006. Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 24 No.1 Juli 2006: 14-17

Syamsul Bahri. 1983. Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang. Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Andalas, 1982-1983

Unruh Jon D. 2001. Viewpoint Poverty and property rights in the developing world: not as simple as we would like. *Land Use Policy* 19 (2002) 275-276

Yakub, B.N. 1995. Hukum Kekerabatan Minangkabau. CV. Pustaka Indonesia, Jakarta